LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL	DIBUAT	DIKENDALIKAN
04 Januari 2018	KASUBAG KEPEGAWAIAN & TI	DOCUMENT CONTROL
TERKENDALI TAPM PT PONTIANAK		
STAMP / STEMPEL	RAHANIA, S.Kom	NURPIAH, S.Sos
NIP	19780319 200904 2 003	19700715 198903 1 001

DIPERIKSA	DISETUJUI
QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE	KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.,MH.	H. SURIPTO, SH.,MH
19571105 198512 1 001	19541005 198103 1 006

PERINGATAN !
Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Jl. Ahmad Yani No.114 Pontianak 78124

STATUS REVISI

NO. REVISI	NO. HALAMAN	BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI	DISETUJUI OLEH	TANGGAL
01	**1 - 3**	**Kop Surat dan Flowchart**	**KPT**	**04 Januari 2018**

	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Jl. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Kalimantan Barat Telp.: (0561) 732065 Fax : (0561) 732065 Email : pengadilantinggipontianak@gmail.com Website : www.pt-pontianak.go.id	**Nomor Dokumen**	W17.U/05/PMPT/SOP-KP/2017
		Tanggal Pembuatan	09 Februari 2017
		Tanggal Revisi	04 Januari 2018
		Revisi Ke	01
		Tanggal Efektif	04 Januari 2018
		Disahkan Oleh	KETUA PT. PONTIANAK
	SOP PENYUSUNAN HAKIM TINGGI PENGAWAS		

Dasar Hukum :

1. UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. UU RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 53
3. Perma No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
4. Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan
5. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-1 Semua Jurusan
2. D3
3. SLTA

Keterkaitan:

1. SOP Pengawasan Reguler

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, dokumen pendukung

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara Pidana banding tidak berjalan secara efesien dan efektif.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Agenda surat masuk/keluar
2. Buku Kontrol SK KPT

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf	Kasub	Sekretaris /Kabag	KPT	Hakim Tinggi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan DUS (Daftar Urut Senoritas) kepada pimpinan sebagai dasar penyusunan SK Hakim Tinggi Pengawas						DUS	1 hari	Susunan Hatimwas
2.	Pimpinan mebuat konsep Susunan Hakim Tinggi Pengawas dari KPT						Susunan Hatimwas	1 hari	Konsep SK
3.	Mengetik Surat Keputusan						Format SK dan Dasar-dasar Hukum	1 hari	SK KPT
4.	menyerahkannya kepada pimpinan untuk ditandatangani		Tidak / Ya	Tidak / Ya	Tidak / Ya		Surat Keputusan	10 Menit	SK KPT
5.	Memberi Nomor dan Mengarsip.						Surat Keputusan	10 Menit	SK KPT
6.	Mendistribusikan SK Hakim Tinggi Pengawas kepada Hakim TInggi Pengawas						SK Hatimwas	1 hari	Arsip

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen